

2.086 Hektar Tanah IKN Bermasalah, Ini Tanggapan Moeldoko

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meyakini bahwa pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tanah seluas 2.086 hektar di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih dihuni oleh penduduk setempat.

Persoalan tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui pendekatan yang tepat. "Bagi kita enggak ada yang enggak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan. Yang penting pendekatannya pas," kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).

Moeldoko mengaku, sejauh ini KSP selalu bisa mengkomunikasikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Ia pun tidak mau mengomentari spekulasi yang menyebut Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari posisi kepala dan wakil kepala Otorita IKN karena persoalan lahan tersebut. "Saya enggak bisa melihat alasan pribadi, tapi selama ini persoalan-persoalan sosial kita bisa komunikasikan dengan KSP," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ke-

pala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih bermasalah. AHY pun mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar pembebasan lahan harus menggunakan pendekatan yang baik supaya tidak ada satu pun masyarakat yang menjadi korban dan merugi.

Di sinilah tentu kita ingin percepatan, tapi tidak ingin grasak-grusuk. Kita ingin semua tahapannya dilakukan dengan baik, pendekatannya humanis, dan insya Allah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik," ujar AHY.

Menurut AHY, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek Tol IKN di Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCL. Luasnya sekitar 44,6 hektar atau lebih kurang 48 bidang tanah. Prioritas lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendalian banjir di Sepaku, Kalimantan Timur. ● han

Prabowo Subianto Terima Kunjungan Mantan PM Turki di Kemhan

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Former Prime Minister of Türkiye atau Mantan Perdana Menteri Turki di era 2016-2018, Binali Yıldırım, yang didampingi Duta Besar Republik Turki untuk Indonesia Talip Küçükkan, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (6/6).

Sekitar pukul 14.20 WIB, Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra menyambut kedatangan Binali Yıldırım dan sekaligus mengikuti rangkaian jajar kehormatan. Kemudian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut menyambut dan menyapa Binali Yıldırım di ruang BTI, Kemhan. "Apa kabar H. E. Mr. Binali Yıldırım. Terima kasih atas kedatangannya ke Kementerian Pertahanan," kata Menhan Prabowo saat berjabat tangan dengan Binali.

"Kabar baik. Terima kasih." Ujar Binali. Pertemuan kedua ini dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung di ruang kerja Menhan RI, Jakarta. Hal tersebut menandai langkah penting

dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, serta menjadi peluang yang baik antara kedua negara, khususnya dalam sektor pertahanan. "Saya sangat mengapresiasi kedatangan H. E. Mr. Binali Yıldırım ke Kementerian Pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia," kata Menhan Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia sangat mengapresiasi komitmen kuat Kementerian Pertahanan Turki dalam mendukung kerja sama industri pertahanan, baik dalam kerangka Government-to-Government maupun Business-to-Business. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan kedua negara dapat saling meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia ke depan.

Kerja sama yang dibangun antara Indonesia dan Turki ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanan nasional, tetapi juga mempererat hubungan diplomatik dan memperkuat posisi kedua negara di kancah internasional. ● han



IDN/ANTARA

AKSI DAMAI TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Aktivis lingkungan menggelar aksi damai mendesak Asia Development Bank (ADB) mengakselerasi transisi energi berkeadilan di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Jumat (7/6). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup serta acara Asia Clean Energy Forum (ACEF) tersebut mereka mendesak ADB serta Pemerintah Jepang sebagai pendiri dan pemegang saham terbesar ADB untuk mengecualikan energi berbahaya dalam portofolionya, memperbanyak komposisi hibah dibanding hutang, melakukan investasi yang transparan, akuntabel, adil, serta memastikan keterlibatan masyarakat.

Tersangka Korupsi Rp17,6 Miliar di Kemnaker Segera Disidang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenakerjaan 2012 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta.

Ada tiga tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.

"Jaksa KPK Ridho Seputra (6 Juni) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Reyna Usman dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan

KPK, Ali Fikri melalui pesan tertulisnya, Jumat (7/6).

Alimengatakan, para tersangka akan didakwa merugikan negara Rp17,6 miliar dari dugaan korupsi yang mereka lakukan. "Sebagaimana dakwaan Tim Jaksa, besaran kerugian keuangan negara dari perbuatan para terdakwa senilai Rp17,6 miliar," ujar Ali.

Uraian lengkapnya, Ali menjelaskan, akan dipaparkan lebih detail saat pembacaan surat dakwaan. Untuk saat ini, Tim Jaksa masih menunggu jadwal sidang perdana untuk membacakan surat dakwaan. Sebagaimana diketahui, KPK saat ini menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012.

Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlahnya masih dalam proses penghitungan. ● han

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

EKSPEDISI RUPIAH BERDAULAT DI WILAYAH 3T

Sejumlah peserta berpose di dekat KRI Karotang-872 saat pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 di Mako Satrol Lantamal XII/Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (7/6). Bank Indonesia Perwakilan Kalbar bersama TNI Angkatan Laut melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024 di Kalbar menggunakan KRI Karotang-872 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yaitu Pulau Karimata, Pulau Maya, Pulau Cempedak, Pulau Pelapis dan Pulau Padang Tikar untuk mendapatkan uang rupiah layak edar.

Peneliti BRIN Nilai Tak Ada Masalah dari Salam Lintas Agama, Ini Dasarnya

Pembangunan infrastruktur memang penting, tapi jangan sampai mengalahkan dialog lintas keimanan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

JAKARTA (IM) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Abdul Jamil Wahab menjelaskan salam lintas agama merupakan salah satu bentuk upaya untuk merawat kemajemukan yang dimiliki Indonesia. Kemajemukan merupakan titah Tuhan sehingga masyarakat tak boleh memiliki keinginan untuk menghapus majemuknya Indonesia.

"Diperlukan kejujuran, khususnya dari tokoh agama dan masyarakat, untuk menyampaikan bahwa perbedaan agama jangan sampai menjadi penyebab diskriminasi sosial hanya karena memiliki keimanan yang tidak sama dengan mayoritas Indonesia," kata Jamil dalam keterangannya seperti dilansir Antara, Jumat (7/6).

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama di Bangka

Belitung beberapa hari lalu menyatakan bahwa salam lintas agama tidak dibenarkan bagi umat Islam. Pasalnya salam itu bagian dari ubudiyah. Alhasil, fatwa itu menuai polemik pro dan kontra.

Kembali ke pernyataan Jamil. Dia mengatakan pihak yang melarang penggunaan salam lintas agama berangkat dari pemikiran bahwa salam adalah bentuk ubudiyah atau urusan ibadah. Namun, kata Jamil, jika salam tersebut dinyatakan sebagai sapaan, hal itu tidak menjadi masalah.

"Tetapi bahwa berbagai ucapan salam, kalau kita memahaminya sebagai kata sapaan pada orang lain atau tahniah, saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya, kalau kita makna bahwa salam lintas agama itu hanya dari sisi pengucaapannya saja yang menggunakan bahasa yang berbeda atau beragam, sesuai

dengan audiens yang ada di hadapan kita, saya kira tidak masalah," jelas Jamil.

Jamil berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih masif lagi pada isu kerukunan umat beragama. Pembangunan infrastruktur dinilai memang penting, tapi jangan sampai mengalahkannya pentingnya pemberian ruang dialog lintas keimanan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Apalagi, sambung Jamil, bangsa Indonesia baru saja memperingati Hari Lahir Pancasila. Menurut Jamil, masyarakat Indonesia seharusnya kembali diingatkan bahwa teramat besar karunia Tuhan yang dianugerahkan pada bangsa ini.

Tidak hanya keragaman sosial dan budaya yang diberikan tempat secara khusus, perbedaan keyakinan pun diwadahi oleh Pancasila sebagai falsafah bangsa.

"Para pendiri bangsa ini telah merancang Pancasila sedemikian rupa, sehingga Indonesia menjadi negara yang mampu menjatani konsep ketuhanan dengan aspek kemasyarakatan," ujar Jamil.

Membahas esensi Pancasila sebagai tolak ukur dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, dia menyatakan bahwa sila pertama dalam Pancasila dapat dianggap sebagai unsur yang mempersatukan perbedaan keyakinan di Indonesia.

"Bahwa pada sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' mampu mengakomodasi keinginan dari berbagai macam kelompok masyarakat, terutama dari kalangan yang mewakili agama-agama yang berbeda," kata Jamil.

"Sebelumnya, terdapat kata 'menjalankan syariat Islam' dan seterusnya, yang kemudian dihapus dalam penetapan final pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada akhirnya, Pancasila hanya memuat 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagai sila pertama," ujarnya.

Jamil mengatakan sila pertama Pancasila hingga saat ini adalah yang disepakati bersama karena tidak tendensius terhadap salah satu agama saja. Hal ini dilakukan karena draft sila pertama Pancasila yang masih memuat kata 'syariat Islam' mendapat pe-

nelakan dari beberapa pihak yang merasa tidak terwakili dengan itu.

Dengan menggunakan kalimat yang lebih umum, Pancasila kemudian dapat disepakati bersama karena dianggap tidak mengistimewakan agama tertentu. Kesepakatan pada sila pertama Pancasila ini juga menjadi akhir dari perdebatan panjang kala dirumuskannya dasar negara Indonesia.

Adanya konsep ketuhanan dalam butir pertama Pancasila secara langsung memberikan penegasan bahwa negara Indonesia yang digagas para pendiri bangsa bukanlah negara sekuler, yang notabene meniadakan aturan agama dalam konstitusinya.

"Konstitusi negara Indonesia menjamin para pemeluk agama, tidak hanya yang beragama Islam saja karena mayoritas, tapi semua pemeluk agama sama kedudukannya di mata hukum dan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum tata negara menjunjung tinggi nilai toleransi, yang juga telah terwakili oleh butir 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dalam Pancasila," pungkas Jamil. ● mei

Tessa Mahardhika Ditunjuk Jadi Jubir KPK Gantikan Ali Fikri, Punya Harta Rp1,1 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Tessa Mahardhika Sugarto menjadi Jubir Bicara (Jubir) Bidang Penindakan menggantikan Ali Fikri yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt).

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan, pergantian tersebut lantaran Ali sudah cukup lama mengisi posisi yang sebelumnya diisi Febri Di'ansyah itu. Terlebih, Ali juga sudah diamanatkan menjadi Kepala Bagian Pemberitaan KPK beberapa waktu yang lalu.

"Di sisi lain, di KPK ini kita percaya banyak talenta-talenta pegawai yang kompe-

ten dalam komunikasi publik," kata Nawawi saat dihubungi wartawan, Jumat (7/6).

Pergantian tersebut, menurut Nawawi, sekaligus penyerangan dan memberikan kesempatan kepada pegawai Lembaga Antirasuah lainnya untuk menjadi jubir KPK. "Jadi enggak ada salahnya kalau kami berencana melakukan semacam 'penyerangan' sekaligus memberi ruang kesempatan pada pegawai-pegawai KPK lainnya untuk menjadi 'corong' lembaga," ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, saat ini Lembaga Antirasuah telah menunjuk penyidik bernama Tessa untuk

mengisi jubir bidang penindakan. "Sekarang sudah ada pejabat jubir yang definitif, saudara Tessa," ujarnya.

Punya Harta Rp1,1 Miliar

Tessa tercatat memiliki kekayaan Rp1.193.152.125 (Rp1,1 miliar) yang ia laporkan pada 22 Februari 2024 dengan masa periodik tahun 2023. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dengan nilai Rp1,1 miliar. Kemudian, kendaraan terdiri dari Honda Vario tahun 2017 dan Hyundai H-1 tahun 2018 yang keduanya bernilai Rp517 juta serta harta bergerak lainnya Rp100 juta. ● han

Pencarian Korban Tertimbun Longsor di Lereng Semeru Dihentikan Sementara

LUMAJANG (IM) - Proses pencarian terhadap satu korban penambang pasir tertimbun longsor di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, dihentikan sementara. Sebab sejak, Jumat (7/6) pagi, di kawasan Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudhi Cahyono membenarkan informasi, penghentian sementara pencarian satu korban penambang pasir atas nama Junaidi, warga Dusun Karanguko RT 21 RW 06, Desa Tamansatnyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang tertimbun longsor. "Untuk sekarang ini belum ada penanganan atau pembersihan dulu karena kondisi cuacanya mendung, dan hujan intensitas ringan," ucap Yudhi Cahyono, dikonfirmasi.

Cuaca yang tidak mendukung membuat proses pencarian satu dari empat penambang pasir, dihentikan sementara. Tim penyelamat gabungan yang dikomandoi Basarnas Jember khawatir bila ada longsor susulan di tebing setinggi lebih dari 80 meter.

Hingga hari keempat pencarian penambang pasir yang terkubur longsor baru membuahkan tiga orang, yang semuanya ditemukan meninggal dunia. Korban terakhir yang ditemukan atas nama Abdul Rohim, warga Dusun Besuk Cukit RT 9 RW 7, Desa Pronojiwo, yang ditemukan pada Kamis (6/6/2024)

sore kemarin pukul 16.30 WIB. "Kurang satu penambang, atas nama Junaidi, masih dalam pencarian. Tapi karena cuaca kurang mendukung tidak ada aktivitas evakuasi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Pronojiwo Murdiono membenarkan tinggal satu penambang pasir yang masih dalam pencarian. Satu korban terakhir yang ditemukan yakni Abdul Rohim, yang ditemukan Kamis sore (6/6/2024) kemarin pukul 16.30 WIB. "Yang kemarin ditemukan atas nama Abdul Rohim, ditemukan di kedalaman empat meter, Kamis sore jam setengah 5," ucap Murdiono.

Sebelumnya diberitakan, peristiwa longsor terjadi di lokasi penambang pasir di Sungai Besuk Bang, Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, pada Selasa siang (4/6) sekitar pukul 11.30 WIB.

Longsor terjadi di tebing tepian Sungai Besuk Bang, yang berhulu di Gunung Semeru. Tebing setinggi 80 meter lebih dengan panjang 30 meter lebih itu longsor. Longsor terjadi saat cuaca cerah dan penambang pasir tengah beraktivitas di aliran Sungai Besuk Bang. Akibat peristiwa ini empat orang dilaporkan tertimbun longsor dan berupa bebatuan dan tanah, satu korban telah ditemukan meninggal, pada Selasa kemarin atas nama Kusnadi Dusun Tulungagung, Desa Pronojiwo, yang ditemukan tewas di kedalaman dua meter. ● mei



IDN/ANTARA

SURAT REKOMENDARI PSI UNTUK PILKADA SULTENG

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (tengah) saat memberikan surat rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (7/6). PSI beri surat rekomendasi ke Ahmad Ali-Abdul Karim di Pilkada Sulteng.